

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Konsep

2.1.1. Konsep Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Inggris. Istilah ini diambil dari ukuran lebar trotoar yang waktu itu dihitung dengan feet (kaki) yaitu kurang lebih 31 cm lebih sedikit, sedangkan lebar trotoar pada waktu itu adalah lima kaki atau sekitar 1,5 meter lebih sedikit. Jadi orang berjualan diatas trotoar kemudian disebut pedagang kaki lima.

Menurut Nugroho (2003:159) Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ) yang diperuntukan untuk pejalan kaki. Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki).

Pedagang kaki lima adalah orang-orang yang menawarkan barang-barang atau jasa untuk dijual ditempat umum, terutama jalan-jalan trotoar. Pedagang kaki lima juga disebut wiraswasta adalah orang yang berjiwa pejuang, gagah, luhur, berani layak menjadi teladan dalam bidang usaha dalam landasan berdiri diatas kaki sendiri (Soeryanto, 2009:89).

Pedagang kaki lima (PKL) adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal. Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha dibidang produksi dan penjualan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu didalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal (Sinambela,2008:14).

Pedagang Kaki Lima merupakan subjek hukum yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum, yang berhak berkehendak atau melakukan perbuatan hukum. Badan hukum dalah perkumpulan atau organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum, misalnya dapat memiliki kekayaan, mengadakan perjanjian dan sebagainya. Sedangkan sebagai subjek hukum (manusia dan badan hukum) dan yang dapat menjadi pokok suatu perhubungan hukum, karena sesuatu itu dapat dikuasai oleh subjek hukum. (Witratmo, 2001,32).

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pedagang kaki lima merupakan suatu usaha kecil yang menawarkan barang dan jasa, selain itu pedagang kaki lima juga menempati tempat-tempat umum untuk berjualan seperti jalan-jalan trotoar, bahkan ada yang berkeliling, namun meski demikian pedagang kaki lima tetap merupakan subjek hukum. Jadi mereka akan dilindungi hukum asal mengikuti aturan-aturan yang berlaku

2.1.2. Bentuk Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima pada umumnya menempati tempat-tempat yang senantiasa dipandang sebagai sebuah keuntungan, misalnya pusat kota, tempat keramaian, hingga tempat-tempat yang berpotensi menjadi objek wisata seperti *Waterfront City* misalnya. Pedagang kaki lima di *Waterfront City* beraneka jenis biasanya ada yang berjualan menggunakan gerobak, menggunakan tenda kecil, berkeliling menjajakan dagangannya, ada yang menggunakan perahu kecil di sekitaran *Waterfront City* dan ada yang menawarkan sewa sekuter dan sepeda.

Menurut Anderson dalam Wahab (2004:8), jenis-jenis pedagang kaki lima adalah sebagai berikut:

1. Agen
Adalah lembaga saluran distribusi yang melakukan transaksi jual beli barang produksi perusahaan.
2. Pedagang besar atau grosir
adalah pedagang yang secara langsung membeli produksi perusahaan dalam jumlah partai besar, lalu menjualnya kepada pedagang kecil (took, warung, kios, dan swalayan).
3. Pedagang eceran atau retailer
adalah pedagang yang membeli barang dari pedagang besar lalu menjualnya kepada konsumen.
4. Makelar
Adalah wakil untuk pembeli atau penjual, makelar mengadakan perjanjian-perjanjian atas nama mereka dalam penjualan atau pembelian suatu barang. Balas jasa untuk makelar dinamakan kuartasi atau provit.

5. Komisioner

Adalah orang atau badan sebagai perantar dalam perdagangan yang kegiatannya menjual atau membeli barang dagangan akan tetapi atas nama sendiri, dan bertanggung jawab atas segala tindakannya dengan memperoleh balas jasa tersebut. Balas jasa untuk komisioner adalah komisi.

6. Agen

Ada dua macam yaitu:

- a. Agen penjualan, adalah orang atau badan yang kegiatannya menjualkan barang hasil produksi milik produsen tertentu kepada konsumen atau kepada pedagang kecil.
- b. Agen pembelian, adalah orang atau badan yang kegiatannya membeli barang-barang hasil produksi dari produsen untuk para pembeli atau konsumen yang membutuhkan di suatu daerah tertentu.

7. Eksportir dan importir

Eksportir adalah pihak yang menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Importir adalah pihak yang membeli barang dari luar negeri kemudian menjualnya di dalam negeri. Eksportir dan importir kegiatannya adalah termasuk perdagangan internasional.

Sedangkan perdaangan dibedakan atas perdagangan besar dan kecil. Dalam perdagangan besar jual beli barang berlangsung secara besar-besaran. Dalam perdagangan besar, barang tidak dijual/disampaikan langsung kepada konsumen atau pengguna, sedangkan dalam perdagangan kecil, jual beli berlangsung secara kecil-kecilan dan barang dijual langsung kepada konsumen.

2.1.3. Tantangan Pedagang Kaki Lima

Terjadi ketimpangan dalam pasar tenaga kerja ini disebabkan karena tidak seimbang jumlah tenaga kerja dengan jumlah lapangan kerja tersedia. Masalah

kependudukan yang dialami oleh negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia, dan dalam beberapa masalah yang perlu mendapat perhatian khusus. Pada negara-negara yang sudah maju, bisa jadi sektor ini tidak terlalu berarti, namun disisi lain kehidupan di negara-negara yang sedang berkembang, sektor informal dianggap sebagai suatu sektor usaha alternatif dari tenaga kerja yang sempat berkiprah pada sektor formal.

Menurut Ananta (2002:13), kepopuleran pedagang kaki lima ini mungkin dalam arti yang positif dan mungkin negatif. Positifnya pedagang kaki lima secara pasti dapat menyerap lapangan pekerjaan dari sekian banyak pengangguran. Para pengangguran ini mencoba berkreasi, berusaha dengan modal sendiri atau tanpa modal. Yang penting mereka adalah orang-orang berani menempuh kehidupan berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan anggapan negatif sebagian masyarakat tentang usaha ini adalah karena mengganggu tata tertib, keamanan, kebersihan, dan kebisingan serta menimbulkan kesemrautan dan banyak sampah.

Di negara Indonesia, persepsi masyarakat tentang sektor informal tidak dipertanyakan lagi, sebab tidak disangkal bahwa sektor ini dapat mengangkat derajat para masyarakat golongan ekonomi lemah, paling tidak sektor ini sudah sangat banyak menampung tenaga kerja yang awalnya sebagai pengangguran, bahkan sebagian anggota masyarakat beranggapan sektor ini adalah pelarian pencari kerja di kota-kota. Anggapan tersebut juga didukung oleh realita kehidupan masyarakat bermigrasi dari daerah-daerah yang kemudian berinteraksi di perkotaan dan pada umumnya bekerja pada sektor informal.

Menurut Hasmah (1996:61) pedagang kaki lima merupakan salah satu kelompok masyarakat kota yang biasanya melakukan kegiatan jual beli ditempat-tempat umum. Sehubungan dengan itu kegiatan ekonomi pedagang kaki lima bukan hanya semrawut, tetapi juga seringkali tidak mengindahkan aturan tata kota maupun ketertiban umum. Akibatnya timbullah masalah hambatan lalu lintas dan ketertiban umum, baik di kota besar maupun di kota-kota kecil.

Menurut Suhardi (2007:27), penertiban pedagang kaki lima (PKL) harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan keindahan tata ruang kota. Walaupun masih ada juga yang berada dipinggir jalan dengan pengaturan yang cukup baik dan tertib, sudah tidak menjadi penyebab macetnya lalu lintas dan tetap menjaga kebersihan lingkungannya. Sebab usaha ini harus diakui keberadaannya dan perlu mendapat pembinaan dan perlindungan bukan justru dibatasi ruang geraknya apalagi disingkirkan.

Dar penjelasan diatas dapat kita simpilka bahwa para pedagang kaki lima biasanya sering dianggap pengganggu karena letak tempat mereka berjualan, kebersihan tempat berjualan, dan seringkali tidak mempunyai izin usaha. Di *Waterfront City* sendiri para PKL seringkali mendapat kesulitan seperti terlalu banyaknya jumlah PKL di *Waterfront* maka persaingan juga semakin meningkat. Jadi mereka harus siap dengan resiko tidak mendapat hasil sesuai dengan yang di harapkan karena faktor cuaca apalagi banyak PKL yang menghamparkan dagangannya di sepanjang promade, mereka harus selalu siap siaga mengamankan barang dagangannya ketika cuaca buruk.

2.1.4. Permasalahan yang Dihadapi Pedagang Kaki Lima

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. peraturan pemerintah waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Sekian puluh tahun setelah itu, saat Indonesia sudah merdeka, ruas jalan untuk pejalan kaki banyak dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan. Dahulu namanya adalah pedagang emperan jalan, sekarang menjadi pedagang kaki lima. Padahal jika menurut sejarahnya, seharusnya namanya adalah pedagang lima kaki.

Dibeberapa tempat, pedagang kaki lima dipermasalahkan karena mengganggu para pengendara kendaraan bermotor. Selain itu ada PKL yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Sampah dan air sabun dapat lebih merusak sungai yang ada dengan mematikan ikan dan menyebabkan eutrofikasi. Tetapi PKL kerap menyediakan makanan atau barang lain dengan harga yang lebih, bahkan sangat murah daripada membeli ditoko. Modal dan biaya yang dibutuhkan kecil, sehingga kerap mengundang pedagang yang hendak memulai bisnis dengan modal yang kecil atau orang kalangan ekonomi lemah yang biasaya mendirikan bisnisnya disekitar rumah mereka.

Pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan bangunan milik

pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap (Gilbert dan Gulger,2007:96).

Pedagang kaki lima merupakan pekerjaan yang termasuk dalam sektor informal. Pekerjaan yang termasuk dalam sektor informal adalah suatu tenaga kerja yang bekerja pada segala jenis pekerjaan tanpa adanya perlindungan Negara dan atas usaha tersebut tidak dikenakan pajak. Pekerjaan pada sektor informal tidak memiliki pendapatan yang tetap, tempat kerja yang tidak memiliki keamanan kerja, tempat kerja yang tidak memiliki status permanen atas pekerjaan tersebut dan unit usaha atau lembaga yang tidak berbadan hukum. Aktivitas-aktivitas sektor informal pada umumnya dikesampingkan, jarang didukung, dan tidak diperhatikan oleh pemerintah.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan permasalahan dari pedagang kaki lima yaitu mereka berusaha di tempat-tempat umum tanpa atau dengan adanya izin dari pemerintah. Pedagang kaki lima juga merupakan salah satu jenis pekerjaan disektor informal yang mempunyai tempat kerja yang tidak permanen, tidak memiliki pendapatan yang tetap, tempat kerja yang tidak memiliki keamanan kerja, tidak memiliki status permanen atas pekerjaan tersebut dan juga unit usaha yang tidak berbadan hukum. adapun beberapa ciri-ciri pedagang kaki lima menurut (Buchari,2016) adalah:

1. Kegiatan usaha tidak terorganisir secara baik.
2. Tidak memiliki surat izin usaha.
3. Tidak teratur dalam kegiatan berusaha, baik ditinjau dari tempat usaha maupun tempat kerja.

4. Bergerombol di trotoar atau di tepi-tepi jalan protokol, di pusat-pusat yang banyak orang ramai.
5. Menjajakan barang dagangannya sambil berteriak, kadang-kadang berlari mendekati konsumen.

Adapun permasalahan yang sering kali dihadapi para PKL yang berjualan di *Waterfront City* seperti tidak tercukupi tempat untuk berjualan yang disediakan karena kekurangan lahan. Hal ini membuat mereka memilih berjualan di promade atau sekitar area jalan *Waterfront*, dengan resiko mereka akan ditertibkan sewaktu-waktu oleh petugas.

2.1.5. Konsep Kebutuhan Keluarga

Kebutuhan keluarga adalah tiang utama bagi kehidupan sebuah keluarga, dimana beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah dan Bersatu, sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan atau hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak.

Menurut Maslow (2014) di dalam kehidupan kebutuhan dasar keluarga memiliki jenis-jenis kebutuhan hidup yang akan selalu berusaha untuk dipenuhi sepanjang masa hidupnya, kebutuhan tersebut berjenjang dari yang paling mendesak hingga yang akan muncul dengan sendirinya. Adapun jenis-jenis kebutuhan keluarga yaitu :

1. Kebutuhan Pendidikan
2. Kebutuhan Kesehatan
3. Kebutuhan Makan
4. Kebutuhan Kendaraan
5. Kebutuhan Semua Anggota Keluarga

Menurut Lestari (2012:6) keluarga adalah rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan atau menyediakan terselenggaranya fungsi-fungsi instrumental mendasar dan fungsi-fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang ada dalam suatu jaringan *Coleman* dan *Cressey* (dalam muadz dkk, 2010:205) menambahkan, keluarga adalah sekelompok orang yang dihibungkan oleh pernikahan, keturunan, atau adopsi yang hidup bersama dalam sebuah rumah tangga.

Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun psikologi yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Kebutuhan dasar manusia yang menjadi dasar dari perkembangan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dibagi menjadi suatu tingkatan tertentu yang memprioritaskan kebutuhan manusia dari yang paling dasar.

perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan di dalam perannya masing-masing menciptakan serta mempertahankan kebudayaan.

2.2. Kajian Teori

2.2.1. Kondisi Sosial Ekonomi

Sosial memiliki artian segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat, sedangkan ekonomi memiliki artian ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, dan segala sesuatunya yang berhubungan dengan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Sosial ekonomi memiliki artian sebagai segala

sesuatu hal yang berhubungan dengan tindakan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Keadaan dan kondisi sosial ekonomi setiap orang memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki kondisi sosial ekonomi rendah, sedang, dan tinggi.

Sosial ekonomi menurut Soerjono Soekanto (2007) adalah posisi seseorang dalam masyarakat berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasinya, dan hak-hak serta kewajibannya dalam berhubungan dengan sumber daya.

Sedangkan menurut Abdulsyani (1994) sosial ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi.

Sosial ekonomi dapat juga diartikan sebagai suatu keadaan atau kedudukan yang diatur secara sosial dan menetapkan seseorang dalam posisi tertentu dalam struktur masyarakat. Pemberian posisi ini disertai pula seperangkat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sipembawa status misalnya, pendapatan, dan pekerjaan.

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan kondisi sosial ekonomi dalam penelitian ini adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam masyarakat yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, kepemilikan aset rumah tangga, dan pemenuhan kebutuhan keluarga. Dengan demikian, keempat hal tersebut mempengaruhi tingkat sosial ekonomi masyarakat yang juga menentukan tinggi rendahnya status seseorang dalam masyarakat.

2.2.2. Faktor-faktor yang Menentukan Kondisi Sosial Ekonomi

Sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, manusia dilahirkan memiliki posisi dan kedudukan yang sama di mata-Nya. Namun kenyataan yang ada di dalam masyarakat tidaklah demikian. Kondisi sosial ekonomi seseorang di masyarakat berbeda sesuai status dan perannya. Menurut Nasution (2004: 25) tingkat status sosial ekonomi dilihat atau diukur dari pekerjaan orang tua, penghasilan dan kekayaan, tingkat pendidikan orang tua, keadaan rumah dan lokasi, pergaulan dan aktivitas sosial.

Namun dalam hal ini, penelitian akan dibatasi pada 3 faktor saja yaitu faktor tingkat pendidikan, pendapatan/penghasilan keluarga, dan keadaan rumah ditambah 1 faktor lain yaitu pemenuhan kebutuhan keluarga/pengeluaran keluarga.

a. Tingkat pendidikan

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 tentang sistem Pendidikan nasional, pada dasarnya jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Pendidikan sendiri menurut UU RI Nomor 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pendidikan adalah aktivitas dan usaha untuk meningkatkan kepribadian dengan jalan membina potensi-potensi pribadinya yaitu rohani (pikir, cipta, rasa, dan hati nurani) serta jasmani (panca indera dan keterampilan-keterampilan). Pendidikan sangatlah penting peranannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan memiliki pendidikan yang cukup maka seseorang akan mengetahui mana yang baik dan mana yang dapat menjadikan seseorang menjadi berguna baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain yang membutuhkannya.

Dapat juga dikatakan tujuan pendidikan adalah sebagai bekal untuk mempersiapkan masa depan seseorang agar berguna bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Tujuan pendidikan nasional sendiri menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang SISDIKNAS, pendidikan bertujuan untuk “Mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”.

Demi mencapai tujuan pendidikan sesuai amanat Undang-Undang tersebut, maka dilaksanakanlah proses pendidikan yang melalui beberapa jalur baik jalur pendidikan formal (pendidikan sekolah) maupun pendidikan nonformal (pendidikan luar sekolah). Dalam jalur pendidikan formal sendiri terdapat beberapa jenjang pendidikan sekolah yang terdiri dari, pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

b. Pendapatan Keluarga

Pendapatan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atas faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan turut serta membentuk produk nasional. Jumlah pendapatan yang dimiliki oleh seseorang akan turut mempengaruhi status sosialnya terutama dalam masyarakat yang matrealistis dan tradisionalis yang sangat menghargai status sosial ekonomi yang tinggi terhadap kekayaan. Menurut Reksoprayitno, pendapatan atau *income* adalah uang yang diterima oleh seseorang dan perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa bunga, dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun (Reksoprayitno, 2009). Ada 3 kategori pendapatan yaitu:

- 1) Pendapatan berupa uang yaitu segala penghasilan berupa uang yang sifatnya reguler dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa atau kontra prestasi.
- 2) Pendapatan berupa barang adalah segala pendapatan yang sifatnya regular dan biasa, akan tetapi selalu berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk barang dan jasa.
- 3) Pendapatan yang bukan merupakan pendapatan adalah segala penerimaan yang bersifat transfer redistributive dan biasanya membuat perubahan dalam keuangan rumah tangga. (Sunuharjo, 2009)

Pendapatan keluarga adalah jumlah penghasilan ril dari seluruh anggota keluarga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan dalam sebuah keluarga. Pendapatan keluarga merupakan balas karya

atau jasa atau imbalan yang diperoleh karena sumbangan yang diberikan dalam kegiatan produksi. Secara konkritnya pendapatan keluarga berasal dari:

- 1) Usaha itu sendiri, misalnya berdagang, bertani, membuka usaha sebagai wiraswastawan.
- 2) Bekerja pada orang lain, misalnya sebagai pegawai negeri atau pegawai swasta.
- 3) Hasil dari pemilikan, misalnya tanah yang disewakan dan lain-lain.

Pendapatan bisa berupa uang maupun barang misalnya berupa santunan baik berupa beras, fasilitas perumahan, dan lain-lain. Pada umumnya pendapatan manusia terdiri dari pendapatan nominal berupa uang dan pendapatan riil berupa barang. (Gilarso, 2008)

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pendapatan keluarga adalah penghasilan berupa uang yang diterima seluruh anggota keluarga sebagai balas jasa dari sebuah kegiatan selama satu bulan dalam satuan rupiah. Jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang akan berbeda karena perbedaan kegiatan sehari-hari yang dilakukan oleh orang tersebut. Pendapatan yang diterima oleh penduduk akan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang dimilikinya.

Dari keterangan di atas dapat dikatakan bahwa pendapatan juga sangat berpengaruh terhadap tingkat ekonomi seseorang. Apabila seseorang mempunyai pendapatan yang tinggi, maka dapat dikatakan bahwa tingkat ekonominya juga tinggi. Di samping memiliki penghasilan pokok, setiap keluarga biasanya juga memiliki penghasilan lain yang meliputi penghasilan tambahan dan penghasilan insidental.

C. Kepemilikan Aset Rumah Tangga

Menurut pengertiannya, aset adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat di kemudian hari. Jadi, aset rumah tangga adalah jumlah kekayaan yang dimiliki oleh keluarga dalam bentuk sumber ekonomi yang memberikan manfaat. Menurut Mulyanto Sumardi (2004) untuk mengukur tingkat ekonomi seseorang dari rumahnya, dapat dilihat dari:

- a) Status rumah yang ditempati, bisa rumah sendiri, rumah dinas, menyewa, menumpang pada saudara, atau ikut orang lain.
- b) Kondisi fisik bangunan, dapat berupa rumah permanen, kayu dan bambu. Keluarga yang keadaan sosial ekonominya tinggi pada umumnya menempati rumah permanen, sedangkan keluarga yang keadaan sosial ekonominya menengah kebawah menggunakan semi permanen atau tidak permanen.
- c) Besarnya rumah yang ditempati, semakin luas rumah yang ditempati pada umumnya semakin tinggi tingkat sosial ekonominya.

Rumah dapat mewujudkan suatu tingkatan sosial ekonomi bagi keluarga yang menempati. Apabila rumah tersebut berbeda dalam hal ukuran dan kualitas rumah. Rumah dengan ukuran besar, permanen dan milik pribadi dapat menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonominya tinggi, berbeda dengan rumah yang kecil, semi permanen dan menyewa menunjukkan bahwa sosial ekonominya rendah.

d. Pemenuhan Kebutuhan Keluarga/Pengeluaran Keluarga

Pemenuhan kebutuhan atau pengeluaran setiap keluarga dengan keluarga yang lain tidaklah sama dan selalu berbeda-beda. Keluarga dengan jumlah anggota yang besar, pengeluarannya berbeda dengan keluarga yang anggota keluarganya

sedikit. T. Gilarso (2004: 63) mengemukakan bahwa besarnya jumlah pengeluaran keluarga tergantung dari hal-hal seperti:

- 1) Besarnya pendapatan keluarga yang tersedia (setelah dipotong pajak dan potongan-potongan lain).
- 2) Besarnya keluarga dan susunannya (jumlah anak dan umur anak).
- 3) Taraf pendidikan dan status sosial dalam masyarakat.
- 4) Lingkungan sosial ekonomi (desa, kota kecil, kota besar).
- 5) Agama dan kebiasaan (hari raya, tahun baru).
- 6) Musim (panen/paceklik, masa ujian/pendaftaran sekolah).
- 7) Kebijakan dalam mengatur keuangan keluarga.
- 8) Pengaruh psikologi (iklim yang menarik, mode-mode baru, pandangan masyarakat tentang apa yang menaikkan gengsi).
- 9) Harta kekayaan yang dimiliki (tanah, rumah, uang).

2.3. Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian relevan yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Ruth Nove Chayaniz Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (2012) pada skripsi yang berjudul “Kondisi Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima Yang Beroperasi di jalan Prof.Dr.M.Yamin di Kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan” di mana penelitian ini menunjukkan adanya pedagang kaki lima yang ada di jalan Prof.Dr.M.Yani yang dapat menimbulkan masalah yang erat kaitannya dengan ketertiban kota dan kebersihan kota, sedangkan dari isi lain pedagang kaki lima jelas membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah pengangguran.

Misalnya, seperti menambah pendapatan masyarakat yang berdagang, setoran khusus perparkiran yang ada dilokasi pedagang kaki lima bahkan membantu menyediakan lapangan pekerjaan serta dapat mengurangi tingkat pengangguran. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan kualitatif yaitu penulis berusaha menggambarkan apa saja yang ada di lokasi penelitian. Persamaan dari penelitian tersebut terletak di judul sama-sama ingin mengetahui kehidupan sosial ekonomi para pedagang kecil.

Penelitian yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Herri Bertus Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (2010) pada skripsi yang berjudul “Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga Pedagang Sayur di Lapak-lapak Pasar Melati di Desa Sui Raya Kabupaten Kubu Raya. Dari penelitian ini menunjukkan bahwa pedagang sayur di Pasar Melati ini pendapatan yang didapat masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan yang didapat masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan yang mereka dapat dengan rata-rata Rp 30.000-Rp70.000 perhari. Selain itu untuk memahami kebutuhan hidup keluarga dan meningkatkan modal usahanya.

Pedagang sayur di lapak pasar melati juga harus membayar sewa tempat yang mereka pakai untuk berjualan sebesar Rp 3.000 perhari dan membayar keamanan Rp 7.000 perbulan. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Herri Bertus lebih berfokus pada bagaimana strategi keluarga dalam membantu kebutuhan hidup keluarga. Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kualitatif, dimana penulis berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan apa saja yang ada di

lokasi penelitian. Persamaan dari penelitian tersebut terletak pada teori yang digunakan dalam penelitian yaitu teori kebutuhan.

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang kehidupan sosial ekonomi para pedagang kecil, namun di sisi lain tempat penelitiannya berbeda meskipun sama-sama meneliti tentang Kehidupan Sosial Ekonomi. Saudara Herri Bertus meneliti di Pasar Melati Desa Sui Raya Kecamatan Kubu Raya, Saudara Ruth Nove Chayaniz meneliti di jalan Prof.Dr.Yamin di kelurahan Akcaya Kecamatan Pontianak Selatan sedangkan peneliti akan melakukan penelitian di *Waterfront City* Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan.

2.4. Alur Pikir Penelitian

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang dijadikan sebagai skema penelitian atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatar belakangi penelitian ini. Kerangka pikir penelitian ini dilakukan agar dapat menjelaskan konsep ketika dilapangan. Berikut adalah kerangka pikir penelitian yang disajikan:

Gambar 1.1.
Alur Pikiran Penelitian

